

KESIAPAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KOTA BENGKULU

Jatmiko Yogopriyatno¹, Nursanty², Loesida Roeliana³

Universitas Bengkulu, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : jyogop@unib.ac.id¹, nursanty@unib.ac.id², loesida.roeliana@unib.ac.id³

Abstract

The study focuses on evaluating the readiness of SRIKANDI implementation through qualitative methods such as interviews, observation, and documentation. The SRIKANDI application has been introduced to all regional apparatus in Bengkulu City, with designated admins responsible for managing the archives within the application. However, the research findings indicate that SRIKANDI in Bengkulu City is not yet fully prepared for implementation. Limited understanding, knowledge, skills, and human resources pose challenges to the effective use of the application by archivists. Additionally, budget constraints for essential resources like laptops, internet access, and iPads further hinder the readiness for optimal implementation of SRIKANDI.

Keywords: archives, application, electronic, online.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kesiapan implementasi SRIKANDI melalui metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aplikasi SRIKANDI telah diperkenalkan kepada seluruh perangkat daerah di Kota Bengkulu, dengan admin yang ditunjuk untuk mengelola arsip di dalam aplikasi tersebut. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa SRIKANDI di Kota Bengkulu belum sepenuhnya siap untuk diimplementasikan. Keterbatasan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penggunaan aplikasi ini secara efektif oleh arsiparis. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk sumber daya penting seperti laptop, akses internet, dan iPad semakin menghambat kesiapan implementasi SRIKANDI secara optimal.

Kata Kunci : Arsip, Aplikasi, Elektronik, dan SRIKANDI

A. PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan dunia, terutama dalam bidang teknologi informasi, menimbulkan respons dari berbagai pihak termasuk pemerintah (Ae Chun et al., 2012). Di Indonesia, upaya terus dilakukan untuk mengadopsi konsep *Electronic Government (E-Government)* dan *Open Government*, dengan fokus pada pengembangan kedua konsep tersebut melalui berbagai kebijakan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi. Namun, pada tahap awal, terdapat satu elemen strategis yang sering menjadi perhatian utama yaitu sistem pengarsipan, seperti penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam konteks pengembangan *e-Government* dan *Open Government*. (Avenue, 2011)

Di lain sisi, pada tahun 2022, dalam perkembangan *e-Government* Indonesia berada di posisi bawah di kancah Asia, dimana Singapura menduduki peringkat 12, Malaysia peringkat 53, Thailand peringkat 55, Brunei Darussalam peringkat 67, sementara Indonesia berada di peringkat 77, seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1
Peringkat *E-Government* Development Indeks di Lima Negara Asia

Country	Group	Rating Class	Rank 2022	EGDI 2022
 Singapore	VHEGDI	VH	12	0.9133
 Malaysia	VHEGDI	VI	53	0.7740
 Thailand	VHEGDI	VI	55	0.7660
 Brunei Darussalam	HEGDI	HV	68	0.7270
 Indonesia	HEGDI	HV	77	0.7160

Sumber: (United Nations Department of Economic and Social Affair, 2022)

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan percepatan pengembangan *e-Government* dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Kementerian Sekretariat Negara, 2018), dimana dalam peraturan ini diatur dan dirancang untuk mempercepat pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan cepat menindaklanjuti dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan arsip elektronik, termasuk Peraturan Kepala (Perka) ANRI Nomor 20 Tahun 2011 yang mengatur Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Mallolongan & Noor, 2023), Perka ANRI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis dalam konteks Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) (Martini, 2020), Perka ANRI Nomor 38 Tahun 2011 yang menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik ANRI (Putra, 2020), Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perumusan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik (Yuliansah et al. 2023), dan Perka ANRI Nomor 15 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik oleh pencipta arsip. Selain itu, upaya pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SJIKN) juga ditekankan (Ibrahim et al., 2023).

Permasalahan dalam pengelolaan arsip pada umumnya masih bersifat manual. Kurangnya perhatian terhadap arsip dalam hal pemeliharaan dan pengamanan arsip serta sistem pemberkasan, mengakibatkan arsip sulit ditemukan kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan (Fathurrohman, 2023). Permasalahan arsip akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Penambahan arsip secara berkelanjutan tanpa didukung oleh prosedur kerja yang tepat, serta kurangnya peralatan dan fasilitas kearsipan yang memadai bersama dengan kurangnya tenaga ahli yang profesional di bidang kearsipan, akan mengakibatkan timbulnya masalah. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, permasalahan di bidang kearsipan dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut: kesulitan dalam pencarian dan akses arsip, kurangnya profesionalisme petugas kearsipan, kekurangan jumlah sumber daya manusia yang terampil di bidang kearsipan, kurangnya kerjasama antara petugas kearsipan dengan pihak-pihak terkait di dalam organisasi, fasilitas pengelolaan arsip yang tidak memadai, serta kurangnya disiplin pegawai dalam pengelolaan arsip (Febrianda et al., 2023)(Martin and Joni 2023).

Seperti halnya instansi pemerintah lainnya, arsip di Kota Bengkulu belum dikelola secara optimal karena masih bergantung pada proses manual. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting. Dengan menerapkan teknologi informasi, pengelolaan arsip dapat dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan memudahkan dalam proses pencarian kembali jika diperlukan. Riset-riset terdahulu tentang Arsip Elektronik dalam kerangka *e-Government* di Indonesia telah banyak dilakukan, seperti; riset tentang adopsi *e-Government* oleh warga negara, dimana faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi oleh masyarakat (Aswar et al., 2023), memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi implementasi dengan kebutuhan dan preferensi pengguna (Sabani, 2020; Sabani et al., 2023). Selanjutnya penelitian tentang *Governance* dan Implementasi *e-Government* yang menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui *e-Government* (Firmandayu & Elfaki, 2023; Gusman & Kusuma, 2023).

Selanjutnya penelitian tentang Pengelolaan Arsip Elektronik dan Implementasi *E-Government*: Menyediakan wawasan tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan arsip elektronik yang efektif (Fathurrohman, 2023b; Febrianda et al., 2023; Harisanty & Anugrah, 2022), yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Prasetyo & Husna', 2021; Prasojo & Kartini, 2022), serta penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam *E-Government*, mengidentifikasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan *E-Government* (Najich Alfayn, 2022; Wijaya et al., 2022), memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi layanan digital (Rozikin et al., 2020).

Belum adanya artikel yang secara khusus membahas kesiapan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kota Bengkulu, menunjukkan potensi penelitian yang belum dieksplorasi dalam konteks spesifik ini. Dengan demikian, penelitian yang fokus pada kesiapan implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan infrastruktur *e-Government* di tingkat lokal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif, teori ini memberikan penjelasan untuk perilaku dan sikap, dan mungkin lengkap dengan variabel, konstruk, dan hipotesis (Creswell, 2020). Pemilihan metode dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang ingin mengkaji dan menggambarkan atau mendeskripsikan (*description*) Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Bengkulu. Kesiapan penerapan SRIKANDI dilihat dengan menggunakan teorinya Richardus Eko Indrajid 2016, dimana dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik ada tiga elemen khusus yang harus dimiliki dan harus diperhatikan secara serius, yaitu: *support*, *capacity*, dan *value*. Dengan menggambarkan tiga elemen tersebut diharapkan kesiapannya akan terpetakan dengan jelas sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat sehingga kedepannya penerapan SRIKANDI di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih optimal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Ridder et al., 2014), sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum hal hal pokok dan penting dari wawancara yang dilakukan kepada informan. Oleh karena itu, hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian diambil intisarinya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan yaitu terkait dengan Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Bengkulu.
2. Penyajian data merupakan penyajian hasil wawancara informan yang telah dilakukan reduksi dan selanjutnya dianalisis jawaban dari masing masing informan untuk mengetahui dan menemukan informasi terkait dengan Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Bengkulu.
3. Penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara beberapa informan yang telah dilakukan reduksi data dan penyajian data, sehingga diperoleh hasil penelitian terkait Kesiapan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Bengkulu.

C. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Arsip Elektronik

Lembaga kearsipan Indonesia belum menetapkan definisi resmi tentang arsip elektronik. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang arsip yang dibuat menggunakan komputer, kita harus berbicara tentang berbagai definisi arsip elektronik. Beberapa definisi dapat ditemukan dalam literatur lokal dan asing. Peter Walne (1988) menyebutkan rekaman elektronik sebagai rekaman atau arsip yang dapat dibaca oleh mesin, di mana arsip elektronik biasanya tersimpan dalam media seperti disket magnetik, pita magnetik, atau kartu berlubang, dan hanya dapat diakses oleh mesin. Arsip elektronik ini disusun dengan cara yang sama seperti awalnya. Arsip bacaan atau terbaca komputer adalah istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada jenis arsip ini (Duchain & Walne, 2015).

Patricia Wallace, Jo Ann Lee, dan Dexter R. Schubert (1992) memberi definisi tambahan dari arsip elektronik sebagai "berkas elektronik yang umumnya terdiri dari beberapa koleksi informasi yang direkam dalam bentuk kode dan dapat dibaca serta disimpan menggunakan komputer dalam berbagai media untuk tujuan temu kembali dan pemanfaatan" (Roeliana & Yogopriyatno, 2023). Sedangkan Jay Kennedy dan Cherry Schauder (1998) memberi definisi yang berbeda dari arsip elektronik, yaitu arsip yang tersimpan dalam komputer dan berbentuk digital (Xiaomi, 2003). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman umum bahwa arsip elektronik merupakan kumpulan informasi yang direkam dan disimpan dalam format digital dalam komputer.

Dalam pengelolaan arsip, ada dua pendekatan utama yaitu daur hidup dan kontinum arsip. Dalam literatur manajemen arsip, konsep daur hidup merupakan pendekatan utama yang melibatkan proses penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan dokumen (Duranti & Rogers, 2019). Metode ini juga dapat mencakup langkah-langkah selanjutnya ketika arsip menjadi bagian dari manajemen lembaga kearsipan statis. Tahapan seperti penilaian, akuisisi, deskripsi, pemeliharaan, dan akses dapat termasuk dalam tahapan ini. Kecuali jika ditetapkan untuk dimusnahkan, semua dokumen mengalami daur yang sama. Metode daur hidup telah menjadi pilihan utama dalam pengelolaan arsip di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir (Pennock, 2019). Secara singkat, pendekatan ini mengatakan bahwa arsip melalui berbagai fase, mulai dari awalnya

sebagai arsip (diciptakan), fase aktif (dirawat dan digunakan), hingga fase penentuan nasib akhirnya (disimpan sebagai arsip statis, dimusnahkan, atau diserahkan kepada pihak lain).

Sementara itu, pendekatan *records continuum* dipandang sebagai alternatif dalam pengelolaan arsip yang dikembangkan oleh peneliti dari Monash University, menyoroti pengelolaan catatan sebagai proses yang berkelanjutan. Australian Standard AS 3490-1996 menggambarkan *records continuum* sebagai keseluruhan eksistensi suatu arsip, mencakup rezim manajemen yang konsisten dan koheren dari waktu penciptaan arsip (dan bahkan sebelumnya, dalam desain sistem pencatatan), hingga tahap preservasi dan penggunaan arsip sebagai arsip statis (Duranti & Rogers, 2019). Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan arsip harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang terus-menerus, bukan sekadar serangkaian tahapan yang berurutan seperti yang terjadi dalam pendekatan daur hidup (Asogwa et al., 2021). Sementara pendekatan daur hidup kurang memperhatikan pentingnya merancang sistem yang memastikan pengambilan dokumen bernilai jangka panjang sejak awal, karena meletakkan penyusutan sebagai tahap terakhir dalam proses daur hidup.

2. Kesiapan Implementasi E- Government

Berbagai lembaga dan institusi mendefinisikan *e-Government* dengan beragam perspektif. Meskipun ada perbedaan definisi, terdapat benang merah yang dapat ditarik dari definisi-definisi tersebut. Berbagai pemerintahan telah memberikan definisi yang mencakup cakupan *e-Government* dalam konteks mereka masing-masing.

Menurut Pemerintah federal Amerika Serikat, *e-Government* merujuk pada penyediaan informasi dan layanan pemerintah secara online melalui internet atau media digital lainnya. Nevada, sebagai salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan *e-Government* sebagai layanan online yang menghilangkan hambatan tradisional bagi warga dan bisnis untuk menggunakan layanan pemerintah, menggantikannya dengan akses yang nyaman ke operasi pemerintah bagi konstituen internal. Di sisi lain, pemerintah Selandia Baru melihat *e-Government* sebagai fenomena, di mana pemerintah menggunakan teknologi baru untuk memberikan akses yang lebih nyaman bagi masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis (Indrajit, 2006).

Meskipun definisi-definisi ini bervariasi, terdapat tiga karakteristik yang umum ditemui dalam setiap definisi *e-Government* (Mensah et al., 2020; Twizeyimana & Andersson, 2019), yaitu pertama, *e-Government* merupakan mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan. Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet. Ketiga, bertujuan untuk memperbaiki mutu atau kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dari beragam definisi dan kesamaan karakteristik yang dijabarkan di atas maka hal yang dapat dikemukakan dalam hubungannya dengan implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu yaitu SRIKANDI akan menciptakan interaksi dalam bentuk yang baru antara Pemda dengan masyarakat dengan tidak perlu bertatap muka langsung tapi cukup mengakses layanan yang telah ada melalui media elektronik (Joshi & Islam, 2018). Dengan hal tersebut diharapkan mutu pelayanan akan lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Harvard JFK School of Government, penerapan konsep digitalisasi dalam sektor publik memerlukan perhatian serius terhadap tiga elemen khusus (Indrajit, 2006).

1. Pertama adalah dukungan (*support*), yang merupakan elemen terpenting yang harus dimiliki oleh pemerintah. Ini melibatkan keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan sekadar mengikuti tren atau menentang inisiatif yang terkait dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya "*political will*," akan sulit bagi berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* untuk berjalan dengan lancar.
2. Kedua adalah kapasitas (*capacity*), mengacu pada kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-Government* menjadi kenyataan.
3. Ketiga adalah nilai (*value*), yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur pertama dan kedua dilihat dari perspektif pemerintah sebagai penyedia layanan, sementara aspek ini menentukan seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya *e-Government*.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu telah mendapatkan dukungan yang penting dalam penyelenggaraan *e-Government*, terutama dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang diperlukan. Selain itu, pegawai yang ada telah mendapatkan pelatihan terkait penyelenggaraan *e-Government* di Kota Bengkulu. Maka dari itu, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menentukan jenis aplikasi *e-Government* yang harus diprioritaskan untuk pengembangannya. Hal ini penting agar dapat memberikan nilai yang signifikan bagi masyarakat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a) Pengelolaan Arsip Digital/Elektronik

Proses pengelolaan arsip dimulai dari penciptaan, yang tergantung pada apakah arsip tersebut dibuat secara manual atau digital. Jika proses penciptaannya manual, langkah awal adalah mengalihkan media ke format digital, sedangkan jika penciptaannya digital, langkah pertama adalah mengidentifikasi arsip tersebut. Setelah melakukan identifikasi berdasarkan instrumen yang tersedia, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam *file home*. Jika arsip digital belum memiliki *file home*, maka *file home* akan dibuat terlebih dahulu. Setelah arsip masuk ke dalam *file home*, langkah berikutnya adalah memilih item dan menambahkan metadata yang sesuai. Kemudian, arsip dimasukkan ke dalam daftar arsip. Untuk naskah dinas atau jenis arsip lainnya, daftar arsip sudah diinput terlebih dahulu di Sistem Informasi Kearsipan Dinamis SRIKANDI sebelum dikirim melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Pada tahap pengelolaan naskah dinas atau daftar arsip untuk mendukung pelayanan publik dan transparansi informasi, proses dimulai dengan pengolahan informasi. Informasi yang telah diolah kemudian disusun menjadi daftar informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menyusun daftar informasi, persetujuan dari pejabat yang berwenang akan diminta sebelum informasi dapat digunakan atau disebarluaskan lebih lanjut. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara sistematis, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

b) Kesiapan Penerapan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Bengkulu

Peneliti merujuk pada studi dari Harvard JFK School of Government yang menyoroti tiga aspek kunci dalam persiapan implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, terkait dengan konsep digitalisasi pada sektor publik, yaitu (Indrajit, 2006):

1. Support

Menyoroti pentingnya keinginan dari pejabat publik untuk secara sungguh-sungguh menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya mengikuti tren atau menciptakan citra kebijakan semata. Selain itu, tanpa adanya unsur "*political will*", implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga membutuhkan dukungan berupa:

- a) Menyepakati kerangka kerja implementasi SRIKANDI sebagai salah satu kunci keberhasilan kesiapan implementasi.
- b) Pengalokasian sejumlah sumber daya (sumber daya manusia, fasilitas, maupun finansial).
- c) Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pendukung berupa jaringan internet yang memadai.
- d) Menyebarluaskan SRIKANDI secara merata, berkesinambungan dan konsisten.

2. Capacity

Kapasitas mengacu pada kemampuan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mewujudkan tujuan kebijakan (dalam hal ini tujuan akhir penerapan SRIKANDI untuk mewujudkan pengelolaan arsip elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu) yang mengacu pada tiga hal, yaitu:

- a) Tersedianya sumber daya yang memadai dari sisi kecukupan jumlah personil maupun dari sisi keterampilan personil.
- b) Tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai
- c) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil

3. Value

Elemen terakhir mengacu pada aspek manfaat yang diperoleh dengan adanya pengembangan SRIKANDI di Kota Bengkulu, hal ini penting untuk memberikan penilaian terhadap hasil yang diperoleh sebagai dampak dari implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu.

Hasil penelitian ini diperoleh setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan dari unit pengelola arsip, termasuk arsiparis dan pengadministrasi umum yang bertugas sebagai admin penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Pengelolaan arsip dinamis di Kota Bengkulu meliputi serangkaian kegiatan, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan arsip yang mendukung pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di berbagai bidang seperti perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Kota Bengkulu.

Kesiapan *e-Government* dalam beberapa aspek telah memberikan dukungan bagi kesiapan implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu, dengan faktor-faktor berikut:

- 1) Faktor kepemimpinan, dalam penyelenggaraan *e-Government* khususnya SRIKANDI di Kota Bengkulu pimpinan telah menunjukkan komitmen dengan mendukung program-program pengembangan *e-Government* dan mengalokasikan anggaran untuk

pengembangan tersebut, serta keteladanan dengan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di SRIKANDI di Kota Bengkulu dalam hubungannya dengan *e-Government*.

- 2) Aspek apresiasi terhadap profesi merupakan aspek yang dinilai oleh peneliti dapat perhatian dari pimpinan, pimpinan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengapresiasi kemampuan mereka dan mengoptimalkan apa yang telah mereka pelajari.
- 3) Kesiapan budaya, SRIKANDI di Kota Bengkulu sudah melakukan beberapa usaha dalam rangka merubah budaya dalam diri pegawai terutama dalam merubah budaya dalam melakukan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah yaitu dalam komunikasi data dan pelayanan terhadap masyarakat dalam pemberian informasi.
- 4) Dalam beberapa aspek, kesiapan implementasi *e-Government* di SRIKANDI di Kota Bengkulu dinilai belum memenuhi syarat dalam menjalankan *e-Government*.
- 5) Kesiapan sumber daya yang dimiliki SRIKANDI di Kota Bengkulu meliputi sumberdaya manusia, sumber daya finansial dan infrastruktur untuk tahap kesiapan pengimplementasian *e-Government* dinilai masih sangat kurang, ini dapat dilihat dari banyaknya kebutuhan sumber daya yang belum terealisasi.
- 6) Faktor regulasi belum menunjang dalam memberi petunjuk pelaksanaan bagi implementasi *e-Government*, karena dinilai belum memberikan arah pembangunan *e-Government* yang akan dilakukan.
- 7) Lembaga pendukung sangat diperlukan dalam pembangunan *e-Government* karena pembangunan *e-Government* melibatkan banyak pihak dan membutuhkan partisipasi banyak lembaga. SRIKANDI di Kota Bengkulu sendiri belum mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan yang ada selama ini hanya kerjasama sebatas konsultasi.
- 8) Koordinasi antar instansi belum berjalan, sementara koordinasi perlu untuk mencari kesepahaman dalam proses menjalankan *e-Government*.

2. Pembahasan

Konsep *E-Government* sendiri membuat pergeseran dari berbagai aspek pemerintahan, termasuk kearsipan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan sebuah aplikasi yang memiliki sistem terintegrasi secara menyeluruh, dimana aplikasi tersebut dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kebocoran data, serta menghindari kehilangan arsip. Namun, dalam proses migrasi dari aktivitas yang dilakukan secara manual menuju sistem elektronik, tentu saja terdapat beberapa kendala. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah dengan memberikan bimbingan teknis bagi administrator di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu. Harapannya, kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan administrator yang diutus oleh masing-masing OPD terkait, sehingga mereka dapat menyebarkan pengetahuan ini kepada seluruh pegawai di OPD masing-masing. Dengan demikian, diharapkan implementasi ini dapat berjalan dengan efektif.

Dalam implementasi Sistem Kearsipan Dinamis Terpadu juga muncul beberapa kendala karena beberapa faktor, termasuk ketersediaan sumber daya yang memadai, mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Dalam hal sumber daya manusia, masalah timbul karena minimnya rotasi atau perpindahan pegawai, sehingga informasi yang diperlukan

tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini mengakibatkan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi secara optimal.

Perbedaan generasi di antara para pegawai juga membuat kesenjangan dalam menerima aplikasi ini sebagai pengganti cara manual yang selama ini digunakan. Beberapa orang dapat memahami dengan cukup mudah bahkan terbantu dengan hal ini, namun beberapa orang lainnya merasa hal ini cukup merepotkan sehingga merasa malas untuk menggunakannya dan lebih nyaman dengan cara manual seperti biasanya. Hal ini dikarenakan proses migrasi dari manual ke elektronik belum sepenuhnya selesai sehingga menyebabkan mereka harus berproses dari awal dan banyak data yang harus diinput dan harus sesuai dengan *template* yang sudah ditentukan. Karena hal itu, beberapa pegawai cukup malas dan pada akhirnya hanya menyerahkan kepada admin dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menyebabkan pekerjaan menumpuk sehingga belum optimal dalam pelaksanaannya.

Cara lama yang dianggap lebih sederhana dan mudah digunakan membuat beberapa pegawai enggan untuk beralih ke aplikasi baru yang memerlukan pemahaman tambahan. Sebagai akibatnya, masih banyak pegawai yang belum mengerti atau memahami cara menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, kendala muncul dari infrastruktur yang tersedia di kantor atau ruang kerja. Terkadang, komputer atau laptop harus digunakan secara bersamaan, padahal implementasi aplikasi ini membutuhkan setiap pegawai memiliki perangkat elektronik sendiri untuk memfasilitasi surat menyurat melalui aplikasi tersebut dengan lebih mudah. Selain itu, koneksi internet yang stabil juga menjadi hal yang krusial, karena implementasi SRIKANDI di Kota Bengkulu memerlukan perangkat yang terhubung secara terus-menerus ke internet agar dapat menanggapi surat masuk dan keluar dari aplikasi tersebut dengan baik.

Good governance dibangun berdasarkan prinsip-prinsip: akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, keterbukaan dan jaminan. Dari prinsip-prinsip tersebut kesemuanya saling memperkuat, transparansi dan keterbukaan serta partisipasi masyarakat adalah hal utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan *e-Government*. *Good governance* merupakan paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan dimana dalam pelaksanaannya *Good governance* akan melakukan hubungan dalam bentuk yang lain. Hubungan dalam bentuk yang baru akan dilakukan dengan penyelenggaraan *e-Government*.

a) *Government To Government*

Salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan *e-Government* dalam mewujudkan *good governance* adalah terjalannya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah secara lebih efisien sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja pemerintah dengan mempercepat pertukaran informasi antar lembaga dan juga terjadinya koordinasi antar lembaga. Dalam pelaksanaannya hubungan *G to G* yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik belum berjalan, dari jaringan yang sudah terpasang berdasarkan observasi belum dimanfaatkan dengan optimal dan pegawai pemerintah masih lebih senang menggunakan sarana manual.

Dengan sudah tersedianya perangkat dan informasi dalam melakukan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah maka koordinasi antar instansi dapat dilakukan dengan lancar dan juga efisiensi kerja pemerintah dapat meningkat. Dalam kaitannya dengan usaha mewujudkan *good governance*, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah yang ada saat ini baru dapat dikatakan untuk memenuhi efisiensi dan efektifitas

yang terdapat dalam 14 karakteristik dalam wacana *good governance* yang dikemukakan oleh Bappenas.

Selain adanya efisiensi dan efektifitas kerja, interaksi antara pemerintah dengan pemerintah dengan menggunakan *e-Government* juga meningkatkan partisipasi. Partisipasi dari unsur pemerintah akan meningkat dengan penggunaan sarana kerja oleh pegawai pemerintah yang lebih memudahkan dalam bekerja.

b) *Government To Public*

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan *e-Government* dilakukan dengan media elektronik, dengan media tersebut pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian informasi dapat tersampaikan dengan lebih baik. Interaksi *e-Government* antara pemerintah dengan masyarakat akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperpendek rantai birokrasi dan memperluas kepedulian masyarakat terhadap program-program pemerintah dengan memberikan informasi kepada masyarakat secepat dan seluas mungkin. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bengkulu, interaksi *e-Government* antara pemerintah dengan masyarakat sudah dilakukan dengan memberikan informasi melalui website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu.

Aplikasi SRIKANDI di Kota Bengkulu berupaya memenuhi kebutuhan akan data yang akurat dan informatif dengan mengupdate informasi yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan atau telah mengalami perubahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa SRIKANDI di Kota Bengkulu masih mengalami kendala karena kekurangan pegawai yang bertugas untuk melakukan pembaruan informasi yang ditampilkan dalam website. Oleh karena itu, SRIKANDI di Kota Bengkulu hanya dapat melakukan pembaruan dengan keterbatasan tersebut.

Selain dapat melihat informasi yang ditampilkan dalam website, masyarakat juga dapat mengirimkan e-mail kepada SRIKANDI di Kota Bengkulu untuk memberikan tanggapan berupa saran dan kritik terhadap keadaan website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan dokumentasi yang disertakan dalam lampiran, SRIKANDI di Kota Bengkulu telah menerima beberapa kiriman masukan berupa tanggapan, saran, dan kritik terhadap website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu. Dari beberapa tanggapan yang dapat dilihat secara lebih jelas dalam lampiran, umumnya pengguna masih membutuhkan tambahan informasi mengenai keberadaan Kota Bengkulu dan selain hal tersebut pengguna juga sudah mulai kritis dengan mempertanyakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu. Pihak SRIKANDI di Kota Bengkulu juga memberikan jawaban atas tanggapan masyarakat terhadap website tersebut.

Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat telah mengandung nilai-nilai yang terdapat dalam penciptaan *good governance*. Interaksi tersebut sedikit banyak telah berusaha menciptakan transparansi dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat, kemudian peningkatan layanan kepada masyarakat juga terdapat peningkatan. Selain tranparansi, interaksi tersebut juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang dilakukan dengan menerangkan kinerja pemerintah dan juga keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dilakukan dengan terbuka terhadap saran dan kritik yang diberikan oleh pengguna. Hal lain juga yang dapat diangkat dengan interaksi tersebut yaitu munculnya

partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya tanggapan, saran, dan kritik terhadap keberadaan website dari pemerintah Kota Bengkulu.

c) *Government To Business*

Sektor usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa, yang berpotensi untuk meningkatkan lapangan kerja. Pada masa Orde Baru, hubungan antara pemerintah dan sektor usaha sangatlah erat, di mana pemerintah memiliki dominasi yang kuat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dari hubungan ini muncul dinamika yang dikenal sebagai hubungan yang kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha. Tujuan dari interaksi *e-Government* antara pemerintah dan dunia usaha adalah untuk meningkatkan layanan kepada pelaku usaha dengan mengurangi birokrasi dan menyediakan informasi yang dapat memperluas peluang bisnis.

Dalam konteks SRIKANDI Kota Bengkulu, interaksi *e-Government* antara pemerintah dan dunia usaha telah dimulai. Melalui platform *e-Government* yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu, layanan kepada pelaku usaha telah ditingkatkan dengan menyediakan informasi potensi daerah. Interaksi ini juga berkontribusi pada pencapaian *good governance* dengan memberikan transparansi kepada pelaku usaha mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu, serta mendorong partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan investasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau yang lebih sering disebut dengan SRIKANDI belum dapat berjalan dengan maksimal, yang artinya belum siap untuk digunakan secara menyeluruh di seluruh OPD di Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam hal ini tentu saja diperlukan banyak pembinaan dari sistem dan sumber daya itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Optimalisasi perlu dilakukan dengan bantuan seluruh stakeholder terkait agar hal ini dapat optimal ketika diimplementasikan secara penuh. Komitmen bersama menjadi masalah utama dalam belum optimalnya penerapan SRIKANDI, karena komitmen dari setiap lapisan penyelenggara akan berpengaruh pada semua aspek terkait, komitmen akan mengarahkan pengambil keputusan untuk memfasilitasi dan mengalokasikan sumber daya, komitmen akan menguatkan pelaksana dalam menyesuaikan dan meningkatkan kapasitasnya supaya bisa menerapkan kearsipan digital dengan konsisten.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah melaksanakan bimbingan dan pelatihan terhadap admin dari setiap OPD perlu ditingkatkan dan perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap setiap OPD di Kota Bengkulu untuk memastikan kesiapan penggunaan SRIKANDI yang kemudian akan dilakukan secara menyeluruh. Optimalisasi pengelolaan arsip dinamis oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu dengan memperhatikan faktor-faktor kearsipan yang meliputi penggunaan sistem penyimpanan yang sesuai, fasilitas yang memenuhi standar, dan kualifikasi petugas kearsipan yang memadai.

REFERENSI

- Ae Chun, S., Luna-Reyes, L. F., & Sandoval-Almazán, R. (2012). Collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 5–12. <https://doi.org/10.1108/17506161211214868>
- Asogwa, B. E., Ezeani, C. N., & Asogwa, M. N. (2021). Status of electronic records management (e-RM) in African university libraries: experience from Nigerian universities. *Library Management*, 42(8–9). <https://doi.org/10.1108/LM-04-2021-0036>
- Aswar, K., Julianto, W., Sumardjo, M., Panjaitan, I., & Nasir, A. (2023). An investigation of the factors affecting citizens' adoption of e-Government in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2). [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.21](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.21)
- Avenue, R. (2011). *e-Government Policy Framework for Electronic Records Management*. In *Crown copyright* (Second ver).
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *Mycological Research*.
- Duchain, M., & Walne, P. (2015). Archive buildings and equipment. In *Archive Buildings and Equipment*. <https://doi.org/10.1515/9783110977684>
- Duranti, L., & Rogers, C. (2019). Trusting Records and Data in the Cloud: The Creation, Management, and Preservation of Trustworthy Digital Content. In *Trusting Records and Data in the Cloud*.
- Fathurrohman, F. S. K. (2023a). Pengaruh Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan dan Efektifitas Kerja Pegawai. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 16(1). <https://doi.org/10.22146/khazanah.75546>
- Fathurrohman, F. S. K. (2023b). Pengaruh Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan dan Efektifitas Kerja Pegawai. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 16(1). <https://doi.org/10.22146/khazanah.75546>
- Febrianda, Eko, H., & Rio, S. (2023a). Rancang Bangun Aplikasi Arsip Surat Menyurat Elektronik Dengan Model Agile Pada Kantor Desa Setia Karya Mandailing Natal. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, 4(1).
- Febrianda, Eko, H., & Rio, S. (2023b). Rancang Bangun Aplikasi Arsip Surat Menyurat Elektronik Dengan Model Agile Pada Kantor Desa Setia Karya Mandailing Natal. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, 4(1).
- Firmandayu, N., & Elfaki, K. E. (2023). The Electronic Government Policy-Based Green Constitution Towards Good governance. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1(2). <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11>
- Gusman, D., & Kusuma, Y. Y. (2023). GAP Analysis of E-Government Implementation In Indonesia. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jutin.v6i1.13483>
- Harisanty, D., & Anugrah, E. P. (2022). Legality of electronic archive management in realizing Indonesia E-Government. *Digital Library Perspectives*, 38(1). <https://doi.org/10.1108/DLP-12-2020-0123>
- Ibrahim, F., Broos, P., Susyana, C. M., & Muthmainnah. (2023). Perancangan Sistem Informasi E-Arsip Dokumen di Bappelitbang Kota Bandung Berbasis PHPRAD. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 7(1). <https://doi.org/10.35870/jtik.v7i1.639>

- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. In *E- Government*.
- Indrajit, R. E. (2016). *E-Government*In Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. In *Yogyakarta : Preinexus* (Vol. 2, Issue 1).
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). *E-Government*maturity model for sustainable *E-Government*services from the perspective of developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061882>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.39>
- Martin, A., & . J. (2023). APLIKASI E-POLICE SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS POLSEK LIMAU). *Technologia : Jurnal Ilmiah*, 14(2). <https://doi.org/10.31602/tji.v14i2.10720>
- Martini, T. (2020). Pengelolaan Arsip Elektronik. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(2).
- Mensah, I. K., Zeng, G., & Luo, C. (2020). *E-Government*Services Adoption: An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020933593>
- Najich Alfayn, M. A. (2022). From *E-Government*to *Good governance*: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2). <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Pennock, M. (2019). Digital preservation in libraries: preparing for a sustainable future. *Archives and Records*, 40(3). <https://doi.org/10.1080/23257962.2019.1664435>
- Prasetyo, A. A., & Husna', J. (2021). Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Sebagai Sarana Temu Kembali Arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 2(1).
- Prasojo, H., & Kartini, M. T. (2022). Konsep Pengelolaan Arsip Digital Untuk Mendukung Percepatan Pelayanan Publik Dan Informasi Publik Di Universitas Jenderal *Prosiding*.
- Putra, W. I. (2020). Pengelolaan Arsip Elektronik. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 8(2).
- Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*, 28(4).
- Roeliana, L., & Yogopriyatno, J. (2023). *Kearsipan*. <https://Penerbitadab.id>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi *E-Government*Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1). <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of *e-Government*in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2). <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>

- Sabani, A., Thai, V., & Hossain, M. A. (2023). Factors Affecting Citizen Adoption of *E-Government* in Developing Countries: An Exploratory Case Study From Indonesia. *Journal of Global Information Management*, 31(1). <https://doi.org/10.4018/JGIM.318131>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of *E-Government*– A literature review. In *Government Information Quarterly* (Vol. 36, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2022). *E-Government Survey 2022 : The Future of Digital Government*. <https://publicadministration.un.org/en/publicadministration.un.org/egovkb/en-us/>
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan *E-Government* di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.27>
- Xiaomi, A. (2003). An Integrated Approach to Records Management. *The Information Management Journal*, 37(4).
- Yuliansah, Y., Sutirman, S., Dwihartanti, M., & Kistiananingsih, I. (2023). Pelatihan Penggunaan ERISE sebagai Media Pembelajaran Kearsipan Elektronik bagi Guru SMK Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(2). <https://doi.org/10.29407/ja.v7i2.18641>